

# EMANSIPASI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB KRITIS (Studi Atas Pemikiran Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno)

**Rasuki**

Dosen STIT Al-Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

## *Abstract*

Dalam masyarakat modern, ditandai dengan problem kemanusiaan yang belum teratasi. Problem tersebut semisal dominasi kekuasaan atas mayoritas. Kekuasaan terhadap mayoritas itu mengakibatkan berbagai berbentuk penindasan, perbudakan yang harus diakhiri. Terkait dengan alasan tersebut maka tugas ilmuwan sosial harus bertanggung jawab terhadap berbagai ketimpangan sosial. Tanggung jawab ini adalah melakukan emansipasi terhadap kelompok mayoritas yang berada dalam posisi tersubordinasi oleh dominasi atau ideologi. Dengan emansipasi, masyarakat modern dapat keluar dari belenggu dominasi atau ideologi, yang telah menimbulkan ketimpangan tersebut. Bentuk ketimpangan sosial tersebut relatif sulit terditeksi sebab telah menjadi laten. Dimana ketimpangan itu telah menjadi kesadaran massal. Maka emansipasi yang dimaksud adalah menyadarkan masyarakat akan adanya ketimpangan yang tidak disadari, oleh karena telah menjadi kesadarannya. Agar ketimpangan sosial diketahui, maka posisi subversif cukup penting dilakukan.

**Keywords** : *Emansipasi, Materialisme Historis, Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, Kritis, Positivisme, Rasio Instrumental, Rasio Teknologis*

## **Pendahuluan**

Adakah hubungan antara teori atau pengetahuan dengan praksis sosial? Para filosof tidak pernah memiliki kesepakatan jawaban atas pertanyaan ini. *Pertama*, para filosof yang mempersepsi bahwa teori atau pengetahuan sama sekali

tidak ada kaitan dengan praksis sosial. Kegiatan memperoleh pengetahuan sebatas upaya pemuasan rasio semata. Sedangkan kelompok *kedua*, para filosof yang berbeda persepsi dengan petama, menegaskan bahwa teori atau pengetahuan sangat memiliki kaitan langsung dengan praksis sosial.

Filosof modern yang mewakili pandangan pertama adalah Francis Bacon (1561-1625). Pemurnian pengetahuan dengan semangat yang sama diikuti oleh aliran filsafat berikutnya, positivisme yang dibidani oleh Auguste Comte (1789-1857) lahir di Kota Montpellier, seorang pemikir yang hidup diabad modern.

Keterpisahan teori atau pengetahuan dari praksis sosial masyarakat pada akhirnya mendapat tanggapan serius kelompok kedua. Para pemikir atau filosof sosial modern ini tergabung dalam kelompok Mazhab Frankfurt, yang dalam tulisan ini disebut Mazhab Kritis. Kelompok ini diwakili Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Bagi kelompok ini, klaim positivisme tersebut sesungguhnya sarat menyimpan ideologi atau kepentingan kelompok tertentu, dan itu harus dibongkar.

Maka salah satunya cara membongkar atau menelanjangi positivisme adalah dengan sikap kritis. Pada titik inilah Mazhab Kritis, lahir dalam rangka membuka atau menelanjangi kedok klaim obyektifitas, bebas nilai atau ideologis positivisme. Jelasnya, semua disiplin ilmu atau pengetahuan yang mengklaim dirinya bebas nilai atau netral, dengan tegas ditolak (negasi) oleh aliran Mazhab Kritis.<sup>1</sup> Hanya dengan usaha semacam ini, emansipasi manusia merupakan sesuatu yang niscaya dilakukan, sebab sifat teoritis pengetahuan murni tradisional atau yang positivistik yang mengejar obyektivitas atau bebas nilai adalah bersifat semu adanya.<sup>2</sup>

## Latar Belakang Kritik Rasio Instrumental

Kritik rasio instrumental memiliki kedudukan yang sangat pokok dalam pemikiran Mazhab Kritis. Meskipun gagasan kritik rasio instrumental itu sendiri dibidani oleh Max Horkheimer dan Theodore Adorno,<sup>3</sup> akan tetapi pada perkembangannya, hampir semua pemikiran tokoh-tokoh Mazhab Kritis mengamini dan melakukan sintesis terhadap gagasan kritik rasio instrumental tersebut. Memperhatikan signifikansi gagasan kritik rasio instrumental dalam

---

<sup>1</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 5-17

<sup>2</sup> Franz Magnis Suzeno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta, Kanisius, 2002), 179

<sup>3</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, (Yogyakarta, Buku Baik, 2004), 66,75

khazanah pemikiran kritis tersebut, maka ulasan di ini sengaja diproyeksikan untuk mengulas soal gagasan kritik rasio instrumental tersebut.

Atas dasar pandangan inilah, maka di samping berurusan dengan materialisme historis, gagasan kritik rasio instrumental juga memiliki urusan yang sangat serius dengan paradigma positivisme, yakni paradigma pengetahuan yang memberikan legitimasi untuk mengobyektivasi fakta-fakta sosial sebagaimana ilmu pengetahuan mengobyektivasi fakta-fakta alam.<sup>4</sup>

Memperhatikan paparan di atas, maka ulasan tentang kritik rasio instrumental hampir tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno dalam melakukan kritik terhadap ajaran-ajaran materialisme historis Karl Marx di satu sisi, dan paradigma positivisme di sisi lainnya.

### **Kritik Terhadap Materialisme Historis**

Semua analis sepakat bahwa ajaran Karl Marx (1818-1883) dibedakan menjadi dua, yakni Marx muda dan Marx tua. Hal ini karena memperhatikan inkonsistensi pemikiran Marx sendiri yang mengubah orientasi perjuangan ideologi kaum proletar yang semula bertumpu pada kekuatan suprastruktur (ideologi, kesadaran) menjadi bertumpu pada kekuatan infrastruktur (ekonomi, pola produksi kapitalistik) pada karya-karya terakhir Marx, khususnya pada karya *Das Capital* (1867).<sup>5</sup>

Menurut Budi Hardiman, karya *Das Capital* lebih mencerminkan Karl Marx sebagai seorang ahli ekonomi yang sangat taat pada kaidah-kaidah determinisme sejarah dan ekonomi.<sup>6</sup> Hal ini sangat berbeda dengan karya-karya Marx sebelum karya *Das Capital* yang lebih mencerminkan Marx sebagai filosof humanis dan memiliki orientasi pencerahan dan pembebasan dalam refleksi filsafatnya. Misalnya hal ini dapat dijumpai dari karya *Das Ellen der Philosophie* (1847), *Manifest der Kommunistischen Partei* (1848), *German Ideology* dan *Paris Manuscript*.

Pada karya-karya yang disebut terakhir, Marx menampilkan dirinya sebagai seorang filosof yang memiliki perhatian yang sangat tajam terhadap perbagai ketimpangan sosial, dan berkepentingan menyeret filsafat di wilayah historis dan

---

<sup>4</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 181

<sup>5</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 234

<sup>6</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 234

melakukan praksis pembebasan terhadap mayoritas manusia yang tertindas di dalam struktur sosial yang timpang tersebut.<sup>7</sup>

Pertama, Marx menggunakan metode dialektika Hegel untuk menjelaskan fenomena sosial yang dipenuhi dengan pertarungan ideologi dan dominasi. Kedua, Marx juga menyepakati bahwa refeksi filsafat harus bersifat historis, karena hanya melalui sejarah manusia dapat mengaktualisasikan dirinya. Ketiga, dalam rangka menajamkan analisis terhadap fakta sosial yang ideologis dan dominatif tersebut, Marx juga menggunakan konsepsi tentang alienasi (konsep yang pernah digunakan oleh Hegel) untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan di selubung ideologi dan dominasi tersebut.<sup>8</sup>

### **Paham Materialisme Historis**

Perbedaannya dengan Hegel justru ditegaskan Marx melalui upaya-upaya menjadikan dialektika bermain di ruang yang bersifat material.<sup>9</sup> Ini terkait dengan komitmen Marx sendiri bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan memang harus memiliki dimensi praksis, sehingga dapat melahirkan kemanfaatan atas upaya-upaya membebaskan manusia dari belenggu ideologi dan dominasi. Melalui komitmen seperti inilah, pada akhirnya gagasan Karl Marx secara keseluruhan diidentifikasi sebagai paham materialisme historis.<sup>10</sup>

Secara umum, paham materialisme historis—sebagaimana yang diajarkan oleh Marx—sangat meyakini bahwa sejarah bergerak progresif tidak ditentukan oleh aspek-aspek supra-struktur semisal kesadaran dan ideologi. Sebaliknya, sejarah bergerak progresif karena didorong oleh aspek-aspek infrastuktur semisal modal dan pola produksi masyarakat (*modes of production*).<sup>11</sup>

Kelas borjuis (majikan, pemilik modal dan aset produksi) memiliki kepentingan ideologis yang berlebihan dalam menjaga keamanan sistem dominasi dalam relasi produksi terhadap kelas proletar (pekerja atau buruh). Di samping karena kelas proletar tidak memiliki posisi tawar apapun karena hajat hidupnya digantungkan secara total pada sistem kerja kapitalisme, kelas borjuis secara ideologis juga selalu menciptakan kesadaran palsu (*false consciousness*) sehingga berbagai ketimpangan yang mewarnai pola produksi kapitalisme gagal direfeksi

---

<sup>7</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 234

<sup>8</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 238

<sup>9</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 239

<sup>10</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 239-240

<sup>11</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 241

oleh kelas proletar.<sup>12</sup> Dalam posisi seperti inilah struktur dan sistem produksi kapitalisme memang sengaja diciptakan untuk menjaga keamanan struktur dominasi kelas borjuis.

Dalam rangka menajamkan analisisnya terhadap fenomena dominasi dalam struktur kapitalisme tersebut, Marx meminjam konsep tentang alienasi dari Hegel untuk menjelaskan situasi ketertindasan mental dan kesadaran yang dialami oleh kelas proletar dalam relasi produksi kapitalisme. Secara konseptual, alienasi merujuk pada kondisi keterasingan atau kesadaran palsu yang disandang oleh kelas proletar karena aspek ideologi yang secara konsisten dimainkan oleh kelas borjuis untuk menjamin kepatuhan para buruh.<sup>13</sup> Dengan kata lain, para buruh sebenarnya menggunakan kesadaran majikan sehingga pada umumnya mereka gagal merefleksikan kondisi-kondisi dirinya yang selalu berada dalam lilitan dominasi majikan.

Marx mengidentifikasi para buruh mengalami empat jenis alienasi sekaligus ketika ia berada di dalam sistem kerja kapitalisme.<sup>14</sup> Pertama, para buruh teralienasi dari alam karena harus melayani sirkulasi produksi massal dan ia tidak memiliki kebebasan menjadi manusia sebagai tuan atas alam. Buruh harus menundukan alam bukan atas kehendak dirinya sendiri, melainkan ditekan oleh sistem produksi massal yang harus mereka layani terus menerus.

Kedua, para buruh teralienasi dari produksi kerjanya sendiri. Pada prinsipnya bekerja adalah usaha obyektif untuk menjamin eksistensi sebagai makhluk sosial. Idealitas obyektif seperti ini tidak pernah dapat dirasakan oleh para buruh karena bekerja dengan sistem upahan telah menjadikan buruh tidak memiliki otoritas apapun atas produk-produk kerja yang dihasilkannya.

Ketiga, para buruh teralienasi dari diri mereka sendiri. Sistem kerja kapitalisme yang sangat kokoh menjadikan para buruh tidak menghiraukan dirinya sendiri ketika harus menguras habis semua tenaganya untuk melayani kepentingan produksi massal. Secara eksistensial buruh kehilangan kesadarannya sendiri di bawah tekanan sistem kerja kapitalisme.

Keempat, para buruh teralienasi dari sesama buruh. Tekanan kerja di sistem kapitalisme telah menjadikan para buruh bersaing dengan sesamanya untuk mendapat perhatian dan upah dari majikan. Kepentingan para buruh untuk

---

<sup>12</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu...*, 228

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, 122

<sup>14</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 238

betahan hidup telah menjadikan mereka bersaing secara terus menerus di dalam sistem produksi kapitalisme.

Melalui telaah seperti ini, Marx kemudian memastikan bahwa ideologi dan dominasi yang mengikuti relasi buruk dan majikan, akan terus berlanjut sampai pada tarap eksploitasi, yakni penghisapan secara maksimal kapasitas tenaga buruh untuk menjamin berlangsungnya pola produksi kapitalisme yang selalu menguntungkan kelas borjuis.<sup>15</sup> Eksploitas akan meningkat tarafnya sehingga semua sisi kemanusiaan buruh akan tergadaikan untuk menjamin tegaknya kapitalisme. Pada posisi eksploitasi berada pada taraf nadhir seperti inilah, Marx meyakini bahwa justru momen penting bagi para buruh untuk merefleksikan kondisi dirinya yang selalu berada dalam belitan dominasi sistem kapitalisme.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Marx, eksploitas merupakan sesuatu yang tidak terelakan dalam sistem produksi kapitalisme, dan eksploitasi juga merupakan momentum bagi buruh untuk mengkonsolidasikan kesadaran kelasnya sendiri (*consciousness*), sehingga hal ini akan melahirkan solidaritas di lingkungan buruh.<sup>17</sup> Berpijak dari pandangan seperti ini, Marx meyakini bahwa keberhasilan buruh dalam merefleksikan kesadaran kelasnya akan menjadi momentum awal meledaknya revolusi kelas.

Revolusi kelas sendiri dianalisis oleh Marx sebagai gejala yang lahir secara deterministik (otomatis dan pasti) karena kekacauan-kekacauan yang ada dalam sistem kapitalisme (inheren) itu sendiri.<sup>18</sup> Inilah muara paham materialisme historis yang menambatkan semua analisisnya untuk meramalkan terjadinya revolusi kelas, yang ditandai oleh penghapusan sistem kelas dan penguasaan modal dan aset produksi secara komunal.<sup>19</sup> Sebuah tatanan masyarakat yang adil dan berkesetaraan.

Oleh para pengikutnya (kaum buruh dan para pemimpin partai Komunis) paham materialisme historis ini ajaran komunis, dan cita-cita kelahiran masyarakat tanpa kelas dipahami sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Maka ajaran materialisme historis memang dipersepsi oleh para pengikut Marx sebagai sebuah ramalah yang pasti terjadi.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, 122

<sup>16</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, 166-167

<sup>17</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, 167

<sup>18</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 243

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, 137

<sup>20</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 27

## Kritik Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno terhadap Materialisme Historis

Pada giliran berikutnya, sesudah Marx meninggal dunia (1883), paham materialisme historis tersebut dibakukan menjadi ajaran partai buruh internasional.<sup>21</sup> Banyak refleksi Marx muda yang bersifat humanis dan memberikan telaah yang tajam pada persoalan suprastuktur untuk mendorong praksis revolusioner tidak lagi diketahui oleh mayoritas pengikut Marx sendiri. Pembakuan ajaran materialisme historis tersebut kemudian lazim disebut sebagai paham determinisme ekonomi.<sup>22</sup>

Di tengah kesibukan pembakuan ajaran materialisme historis seperti inilah, analisis tentang revolusi proletariat sepenuhnya dipahami sebagai keniscayaan sejarah, dan kesibukan buruh dan partai komunis hanya menunggu kapan ramalan tersebut akan terjadi.

Dengan latar belakang seperti inilah, Mazhab kritis sengaja didirikan oleh sejumlah intelektual muda di Jerman sebagai upaya melakukan *counter-discursive* terhadap ideologi dominan Marxisme-Leninisme yang menyebabkan masyarakat semakin tidak berdaya dibawah kontrol rezim diktator proletariat tersebut. Para pendiri Mazhab kritis sendiri tidak lain adalah para pengikut Marx yang mencoba bersikap kritis terhadap ajaran Marx yang dibakukan.

Max Horkheimer dan Theodor Adorno sebagai generasi pertama Mazhab Kritis yang memiliki pengalaman langsung tentang bagaimana cita-cita emansipasi dalam ajaran Karl Marx telah 'diselewangkan' sedemikian rupa melalui pembakuan ajaran ekonomisme Marxisme-Leninisme. Secara faktual, kekuasaan proletar sama sekali tidak dapat menjamin terwujudnya cita-cita keadilan sosial dan kesetaraan sebagaimana diimpikan oleh Marx dan para pengikutnya sendiri.<sup>23</sup> Di mata Horkheimer dan Adorno, kekuasaan diktator proletariat semacam ini telah menjadi tiran baru yang menyebabkan mayoritas manusia menjadi terbelenggu oleh dominasi untuk kesikian kalinya.<sup>24</sup>

Ajaran materialisme historis bagi Max Horkheimer dan Theodor Adorno, dianggap berlebihan dalam menautkan alamat ketertindasan proletariat pada aspek-aspek infrastruktur semisal pola produksi dan modal, sehingga aspek-aspek lain tidak pernah dikalkulasi dalam proses mengupayakan emansipasi.

<sup>21</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 26-27

<sup>22</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 27

<sup>23</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu...*, 167-168

<sup>24</sup> Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz, 2006), 100

Keterfokusan analisis pada aspek infra-struktur ini telah menggiring materialisme historis menjadi alat analisis yang sedemikian tumpul, sebab semua variabel ketertindasan telah direduksi sedemikian rupa menjadi sekadar urusan relasi manusia dengan sistem produksi kapitalisme dan semua turunannya.<sup>25</sup>

Hal inilah yang menjadi alamat kritik generasi revisionis Marx yang berkepentingan mengevaluasi ajaran-ajaran materialisme historis, termasuk kegagalan revolusi kelas karena tumpuhnya paradigma gerakan kaum butuh internasional. Sebelum Mazhab Kritis lahir, sebenarnya sudah ada beberapa tokoh yang mengajukan keberatan terhadap keterfokusan analisis materialisme histories pada aspek infrastruktur tersebut. Dengan mempertanyakan, mengapa revolusi gagal diwujudkan, tokoh semisal Antonio Gramsci (1819-1937) misalnya, mengembangkan analisis yang lebih tajam dari sekadar terjebak pada persoalan infra-struktur dan semua turunannya.<sup>26</sup>

Mantan anggota Partai Komunis Italia ini akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan revolusi proletariat tidak lain karena pembiusan kesadaran kaum proletar yang ditempuh melalui afiliasi ideologi borjuis dengan negara, sehingga umumnya kesadaran buruh dikendalikan oleh ideologi kekuasaan ini, dan inilah yang menjadi alasan terkuat mengapa pada umumnya buruh gagal merefleksikan kesadaran kelasnya.<sup>27</sup> Gramsci kemudian mengidentifikasi bahwa kegagalan revolusi proletariat disebabkan oleh bermainnya hegemoni, yakni pembiusan kesadaran kaum buruh karena menguatnya afiliasi ideologis-kekuasaan borjuis-negara.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kecenderungan analisis yang dikembangkan oleh kelompok revisionis adalah berpaling dari keterfokusan Marx pada aspek infra-struktur ketika menganalisis ketertindasan proletar. Sebagaimana ditemukan oleh Gramsci, aspek ketertindasan proletar justru tertambat pada aspek suprastruktur, semisal kesadaran dan ideologi kaum buruh yang dikendalikan sedemikian rupa oleh kekuasaan afiliatif borjuis-negara.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Horkheimer dan Adorno adalah menyeret kembali materialisme histories pada basis supra-struktur. Tentu saja analisis kritis yang dikembangkan kedua tokoh tersebut tidak hanya berhenti pada capaian kelompok revisionis pendahulu, semisal Gramsci. Lebih

---

<sup>25</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*, 177

<sup>26</sup> Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri...*, 77

<sup>27</sup> Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri...*, 77-78

<sup>28</sup> Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri...*, 78

jauh, analisis kritis berkepentingan meneropong alamat ketertindasan yang paling latén dan berhasil mengkonsolidasi kesadaran proletar secara massif sehingga berbagai usaha mendorong mereka untuk melakukan revolusi kelas gagal dilakukan.<sup>29</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, terdapat dua variable yang memberikan penjelasan mengapa mayoritas tertindas selalu gagal merefleksikan ketertindasan mereka sehingga berbagai upaya emansipasi tidak mungkin dilakukan. Pertama, masyarakat hidup di bawah bayang-bayang konstruksi kebudayaan modern yang pada dasarnya menindas akan tetapi menjanjikan berbagai perubahan menuju taraf hidup yang berkeadilan. Janji-janji kebudayaan modern inilah yang menjadi kesadaran masyarakat itu sendiri.<sup>30</sup> Sehingga dapat dikatakan sebenarnya kelompok-kelompok tertindas hidup di bawah bayang-bayang imajinasi modernisme.

Kedua, bangunan kebudayaan modern juga dialiri oleh basis pengetahuan yang sangat berpretensi dalam menaturalisasi fakta ketimpangan atas nama obyektivitas dan universalisasi pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud dalam analisis kritis tersebut tidak lain adalah paradigma positivisme.<sup>31</sup> Sebuah paradigma pengetahuan yang dirintis oleh Aguste Comte di Prancis, dengan maksud epistemologis menemukan hukum-hukum fakta sosial dengan menggunakan instrument sebagaimana lazim digunakan oleh ilmu-ilmu alam.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan variabel pertama, perlu ditegaskan bahwa analisis kritis meneropong sistem kapitalisme modern sebagai sesuatu yang sudah mapan karena berbagai afiliasi ideologis yang berhasil dilakukan. Maka apa yang disebut sebagai kapitalisme dalam analisis tersebut, bukanlah kapitalisme yang identik dalam analisis materialisme historis. Kapitalisme dalam amatan materialisme historis merupakan sistem produksi yang dikendalikan oleh borjuis secara langsung, sehingga berbagai bentuk alienasi dan dominasi yang diterima oleh proletar juga berlaku secara langsung. Dalam amatan seperti ini, representasi sistem kapitalisme tidak lain adalah kelompok majikan yang mengendalikan kekuasaannya secara langsung dalam rangka melipatgandakan modal.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, 157-158

<sup>30</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu...*, 168-169

<sup>31</sup> Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, *Dialektika Pencerahan*, (Yogyakarta, Ircisod, 2002), 52

<sup>32</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme Dan Modernitas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), 22

<sup>33</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu...*, 59-60

Kapitalisme yang memiliki alamat jelas tersebut sangat berbeda dengan sistem kapitalisme dalam amatan analisis kritis. Mazhab Kritis lahir di awal abad 20, ketika sistem kapitalisme sudah berkembang sedemikian rupa, dan afiliasi-afiliasi ideologis yang dilakukan juga berhasil mengokohkan sistem ini di satu sisi, dan semakin melemahkan posisi tawar proletar di sisi lainnya. Kuatnya struktur kapitalisme yang berhasil meredam semua potensi resistensi kelompok-kelompok yang dieksploitasi ini lazim disebut sebagai kapitalisme lanjut (*the late of capitalism*). Dengan cadangan modal yang semakin besar dan kekuatan afiliasi ideologis dengan negara yang semakin mapan, ancaman terbesar yang dihadapi oleh kapitalisme bukan lagi kekuatan buruh yang berpotensi meledakkan revolusi kelas, melainkan potensi-potensi pasar yang harus dikondisikan tetap ada untuk mendistribusikan produksi massal.

Kapitalisme lanjut kemudian dicirikan oleh kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi pencitraan dan imajinasi akan kebutuhan konsumsi terhadap barang-barang yang diproduksi secara massal. Dalam konteks seperti inilah, sistem kapitalisme itu sendiri menjadi sistem yang anonim.<sup>34</sup> Dominasi sudah tidak dapat diidentifikasi sebagai struktur dominasi majikan *vis a vis* buruh. Tidak ada lagi dominasi yang dapat direfleksikan secara baik oleh kelompok-kelompok tertindas, karean semua jenis kesadaran, imajinasi, hasrat, dan kebutuhan konsumsi masyarakat secara total telah berhasil didesiminasikan secara ideologis oleh sistem kapitalisme. Dalam posisi seperti ini, dominasi kapitalisme telah merubah bentuknya menjadi kebudayaan pop yang bersifat massal dan diperagakan secara massal pula oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap kapitalisme sekalipun.<sup>35</sup>

Sistem kapitalisme yang berubah wujud menjadi budaya massa inilah yang menguatkan bahwa akar ketertindasan masyarakat di bawah kapitalisme sama sekali tidak tertambat pada persoalan supra-struktur. Justru sebaliknya, kesadaran masyarakatlah yang menjadi target dan lokus beroperasinya kesadaran-kesadaran konsumtif, dan inilah yang akan terus menerus membelenggu masyarakat menjadi bagian dari sistem kapitalisme yang menindas.<sup>36</sup> Melalui analisis seperti ini, Max Horkheimer dan Theodor Adorno berhasil menelanjangi kebobrokan dan kebusukan kapitalisme sampai di persembunyian yang paling laten.

---

<sup>34</sup> Max Horkheimer Dan Theodor W. Adorno, *Dialektika...*, 365-367

<sup>35</sup> Max Horkheimer Dan Theodor W. Adorno, *Dialektika...*, 221-222

<sup>36</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu...*, 234

Bila aspek terpenting ketertindasan massal masyarakat dalam sistem kapitalisme tidak lain adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, maka masyarakat tidak akan dapat dibebaskan dari ketertindasan tersebut kecuali kesadaran mereka diudar terlebih dahulu. Dengan kata lain, gerakan emansipasi yang berkepentingan mendorong masyarakat ke arah hidup yang lebih berkeadilan akan selalu menemui jalan buntu, apabila tidak ada usaha penyadaran yang dilakukan para ilmuwan atas keterperangahan mereka pada imajinasi konsumerisme yang didesain sedemikian rupa oleh kapitalisme dengan berkedok pada modernisme.<sup>37</sup>

### **Prosedur Pengetahuan Positivistik dan Klaim Obyektivitas**

Analisis kritis Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno tidak sekadar berhenti pada kebudayaan modern yang menggambarkan ketertindasan mayoritas manusia, tetapi juga berlanjut dengan melacak akar-akar ketertindasan tersebut sampai di wilayah epistemologis.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, positivisme dirintis oleh seorang filosof Prancis yang sangat konservatif dalam menolak revolusi, Auguste Comte. Menurutnya, revolusi sosial sama artinya dengan memaksakan perubahan yang tidak natural dalam diri masyarakat. Argumentasi penolakannya terhadap revolusi sangat berkaitan erat dengan sikap pengetahuannya, bahwa masyarakat memiliki kemampuan inern pada dirinya untuk terus bergerak progresif, sehingga berangsur-angsur akan sampai pada tahap ideal (masyarakat positivistik).<sup>38</sup>

Sampai pada akhirnya Comte sendiri yang menyebut paradigma pengetahuan yang sedang dibidannya sebagai paradigma pasitivistik. Dengan merefeksi obyek sosial, Comte sangat meyakini pandangan-pandangan kelompok empirisme tetang kepastian pengetahuan dalam membongkar hukum-hukum alam. Berbekal keyakinan ini, Comte pada gilirannya juga menyimpulkan bahwa fakta sosial sekalipun memiliki kecenderungan yang sama untuk selalu patuh pada hukum-hukum supra-historis yang mengaturnya. Oleh karena itu, tugas ilmu pengetahuan sosial tidak lain adalah menemukan dan membongkar hukum-hukum sosial tersebut sebagaimana prosedur yang digunakan oleh ilmu-ilmu alam. Mungkin karena alasan ini, pada awalnya Comte menyebut disiplin ilmu yang ia bidani dengan nama Fisika Sosial, sebelum pada akhirnya ia ganti sendiri dengan nama Sosiologi (1839).<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 61

<sup>38</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 207-208

<sup>39</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*, 17

Kedua, sebagai disiplin ilmu yang lahir belakangan, ilmu sosial tidak harus membidani metode tersendiri dalam menjalankan kerja pengetahuannya. Comte sangat mengapresiasi warisan metode pengetahuan yang sudah dibangun berabad-abad lamanya sejak Rene Descartes (1596-1650) karena terbukti bahwa metode dan instrumen pengetahuan yang ditemukan baik oleh rasionalisme maupun empirisme modern memiliki validitas untuk diterapkan secara langsung pada ilmu-ilmu yang lahir kemudian.<sup>40</sup>

Dalam konteks inilah Comte menyusun apa yang ia sebut sebagai “hierarki ilmu pengetahuan” sebagai argumentasi untuk membenarkan penggunaan metode dan instrument ilmu-ilmu alam yang dapat diterapkan secara langsung pada ilmu sosial. Berdasarkan telaah yang ia lakukan, disiplin ilmu dapat disusun secara hierarkis berdasarkan kelahirannya, yakni Matematika, Astronomi, Fisika, Kimia, Fisiologi, Biologi, dan Fisika Sosial (Sosiologi).<sup>41</sup>

Melalui hierarki seperti ini, Comte menelaah lebih lanjut bahwa semua disiplin ilmu yang lahir sesudah Matematika diketahui selalu menggunakan instrument Matematika sebagai alat analisisnya. Hal ini berlaku pada disiplin ilmu Astronomi, Fisika, Kimia, Fisiologi dan Biologi. Dan penggunaan Matematika sebagai instrument analisis terbukti valid dalam kerja pengetahuan yang dilakukan di berbagai disiplin ilmu yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, Comte kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Fisika Sosial (Sosiologi) sebagai disiplin ilmu yang lahir belakangan, dengan sendirinya dapat menggunakan Matematika sebagai instrument analisisnya secara langsung meskipun diterapkan dalam obyek sosial.<sup>42</sup>

Dengan basis argumen seperti ini, Auguste Comte kemudian melanjutkan telaahnya pada upaya pembakuan prosedur kerja positivisme, atau kemudian lazim disebut sebagai prosedur positivisme, yakni pembakuan metode kerja penelitian sosial yang diracik melalui semangat empirisme dengan instrument analisis yang dikembangkan dari Matematika, atau kemudian lazim disebut dengan analisis statistik.<sup>43</sup> Inilah landasan epistemologis yang membenarkan cara memposisikan obyek sosial sama persis dengan cara pengetahuan memposisikan obyek alam, termasuk dalam melakukan perekayasaan (*treatment*) di dalamnya.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 209

<sup>41</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 209

<sup>42</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 209

<sup>43</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*, 17

<sup>44</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Mempampai Positivisme...*, 22

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa secara ontologis, positivisme mewarisi semangat kerja pengetahuan yang diwariskan oleh rasionalisme. Tugas terpenting pengetahuan adalah untuk mengetahui hukum-hukum supra-historis yang menaungi obyeknya. Dalam konteks ilmu sosial, tugas positivisme tidak lebih hanya berurusan dengan upaya mengetahui hukum-hukum dinamika dan statistika sosial yang menaungi fakta sosial itu sendiri.<sup>45</sup>

Melalui landasan ontologis semacam itu, Comte memastikan bahwa prosedur positivisme yang diperkenalkan juga hanya menjadi instrument kerja penelitian sosial yang hanya sampai pada kapasitas untuk mengetahui (*to know*). Secara epistemologis, prinsip untuk mengetahui dalam kerja positivisme ditetapkan sebagai kegiatan menjalankan prosedur pengetahuan secara benar, dengan membebaskan diri dari kepentingan (*interest*) dan ideologi (*ideology*) sehingga kerja pengetahuan memperoleh hasil yang valid dan obyektif.<sup>46</sup>

Melalui desiminasi yang sangat panjang, kemudian dipopulerkan kembali oleh ilmuan-ilmuan sosial di lingkungan Wina (*Vienna cycle*), akhirnya paradigma positivisme berhasil menjadi standar validitas dan obyektivitas kerja-kerja penelitian sosial.<sup>47</sup> Dan paradigma yang sama sampai saat ini juga masih menjadi rezim pengetahuan di hampir semua kampus dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

### **Kritik Max Horkheimer dan Theodor Adorno terhadap Positivisme**

Sebagaimana sudah dipaparkan di bagian sebelumnya, analisis kritis yang dikembangkan oleh Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno tidak berurusan dengan kebudayaan modern yang menggambarkan ketertindasan mayoritas manusia, tetapi juga epistemologis positivisme yang dianggap memberikan landasan-landasan normatif bagi berlangsungnya penindasan terhadap mayoritas.<sup>48</sup> Sejak awal mengembangkan analisis kritisnya, kedua tokoh tersebut selalu mempersoalkan kecenderungan filsafat metafisika Barat yang hanya berkepentingan mengetahui obyek yang diamatinya. Menurut kedua, hal ini mencapai puncaknya di tangan positivisme, karena kepentingan pengetahuan tidak hanya mengetahui fakta sosial, tetapi juga membiarkan fakta tersebut

---

<sup>45</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern...*, 209

<sup>46</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme...*, 22-23

<sup>47</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 11

<sup>48</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*,178

bergulir secara natural karena adanya anggapan bahwa masyarakat memiliki potensi pada dirinya sendiri untuk bergerak progresif.

Klaim pertama positivisme yang diuji kebenarannya oleh kedua tokoh tersebut adalah klaim bahwa fakta bersifat natural dan deterministik. Dengan melacak kembali sejarah Barat, maka klaim bahwa fakta sosial bersifat natural dengan mudah dapat dibatalkan. Sejarah Barat yang berkembang melalui aforisme relasi majikan-budak, sama sekali tidak pernah dapat dikategorikan sebagai sejarah yang bergerak natural. Fakta sosial yang berkembang melalui relasi kerja, ideologi, dominasi dan eksploitasi sebagaimana pengalaman sejarah Barat, merupakan fakta yang sedemikian rupa dikendalikan oleh saluran-saluran kekuasaan yang ada di dalam fakta itu sendiri.

Dengan demikian, klaim positivisme bahwa fakta sosial berlangsung secara natural (*by natural*) tidak hanya mentah, tetapi juga a-historis. Menurut pendapat Horkheimer dan Adorno, fakta sosial yang hanya mungkin bergerak melalui saluran-saluran kekuasaan—sebagaimana dijumpai dalam sejarah Barat—merupakan fakta yang lahir dengan desain-desain tertentu (*by design*), dan oleh karena itu selalu ada kelompok yang berkepentingan menjaga fakta tersebut dalam keadaan mapan dan menguntungkan segelintir orang.

Di posisi inilah, kritik Horkheimer dan Adorno terhadap positivisme mulai masuk ke persoalan-persoalan yang lebih krusial. Pertanyaan umum yang diajukan oleh kedua tokoh ini adalah, bagaimana mungkin seorang ilmuwan dapat berdiri pada posisi obyektif dan bebas ideologi, sementara fakta sosial yang selalu dipijaknya merupakan fakta yang disesaki oleh berbagai macam tarik ulur ideologi dan dominasi (?). Apalagi tarik ulur ideologi dan dominasi tersebut selalu menyisakan kelompok mayoritas yang tertindas.

Melalui pertanyaan kritis seperti ini, selanjutnya kedua tokoh tersebut menengarahi bahwa obyektivisme sebagaimana dipropagandakan oleh positivisme perlu diposisikan sebagai usaha ideologis pengetahuan untuk melindungi ketimpangan-ketimpangan fakta sosial dari amatan pengetahuan.<sup>49</sup> Obyektivisme adalah tameng pengetahuan untuk mengartikulasikan pembelaan-pembelaan ideologisnya terhadap kelompok-kelompok dominan, yang memiliki otoritas dalam mengendalikan ketimpangan sosial.

Pertama, klaim obyektivitas pengetahuan berpotensi menaturalisasi ketimpangan dan dominasi yang selalu ada di setiap fakta social. Ini berarti bahwa

---

<sup>49</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi...*, 177-178

atas nama obyektivitas, justru pengetahuan sebenarnya sedang berpretensi menyembunyikan fakta sosial yang timpang tersebut.<sup>50</sup>

Kedua, klaim obyektivitas dalam positivisme hanya diperoleh apabila seorang ilmuwan menaati prosedur pengetahuan sebagaimana yang dibakukan oleh positivisme. Hal ini berarti bahwa untuk menjadi obyektif seorang ilmu memang tidak perlu menggunakan rasionya ketika harus berhadapan dengan fakta, karena pada prinsipnya obyektivitas cukup diperoleh dengan menaati prosedur yang sudah baku.

Dalam posisi seperti inilah, positivisme dianggap oleh Horkheimer dan Adorno sebagai paradigma yang sangat berpretensi mematikan peran dan fungsi rasio dalam kerja penelitian sosial.<sup>51</sup> Bila kesibukan ilmuwan sosial hanyalah menjalankan prosedur, maka status dan fungsi rasio itu sendiri akan berubah menjadi, apa yang disebut oleh Horkheimer dan Adorno, sebagai rasio perkakas (*rasio instrumental*). Ini adalah sebuah kenaifan karena sejarah filsafat dan pengetahuan modern dimulai dengan semangat mengembalikan tugas dan fungsi rasio setelah berabad-abad lamanya dimatikan oleh dogmatika agama, bagaimana mungkin untuk kesekian kalinya fungsi dan tugas rasio tersebut dimatikan kembali oleh pengetahuan modern dalam rangka menjamin klaim obyektivitas dan validitas pengetahuan.<sup>52</sup>

Melalui analisis kritik seperti ini, Horkheimer dan Adorno kemudian menengarai bahwa positivisme sendiri tidak lain adanya bangunan pengetahuan yang berperan penting dalam mengokohkan ketimpangan sosial, menguatkan sistem dominasi sistem kapitalisme lanjut, dan dengan demikian positivisme menjadi saluran yang penting untuk menjaga berbagai ketimpangan sosial tersebut tetap dalam kondisi mapan.<sup>53</sup>

Horkheimer dan Adorno tidak segan-segan menyebut positivisme sebagai paradigma yang menyelubungi ketimpangan tersebut agar senantiasa gagal direfeksi oleh masyarakat yang selalu hidup dalam belitan dominasi dan penindasan baik oleh kapitalisme maupun oleh kebudayaan massa yang konsumeristik.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 52,54

<sup>51</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 52-55

<sup>52</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat...*, 250

<sup>53</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme...*, 24

<sup>54</sup> Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, *Dialektika Pencerahan...*, 267-277

Memperhatikan analisis kritis di atas, maka kritik rasio instrumental sebenarnya merupakan kritik paradigmatis yang dimaksudnya untuk mengevaluasi sistem kerja positivisme dan metafisika Barat secara keseluruhan yang hanya berpretensi untuk mengetahui obyek refleksi pengetahuan (*to know*). Sebagai penerus Marx, baik Horkheimer maupun Adorno sangat meyakini bahwa kerja pengetahuan tidak cukup hanya untuk mengetahui obyek yang direfleksikannya. Lebih dari itu, filsafat dan ilmu pengetahuan harus bermaksud praksis. Dengan kata lain, nilai penting refleksi filsafat dan kerja pengetahuan adalah kemampuannya untuk terlibat secara praksis dalam aksi-aksi sosial mendorong perubahan ke taraf hidup yang lebih berkeadilan dan setara.<sup>55</sup>

Melalui penjabaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tidak semua warisan Marx dimentahkan oleh tokoh-tokoh Mazhab Kritis. Semangat bahwa filsafat harus memiliki maksud praksis tetap dipertahankan sebagai orientasi kerja pengetahuan, dan dengan demikian semakin tegas pertautan epistemologi dan ideologi antara Karl Marx dan Mazhab Kritis. Perselisihan tokoh-tokoh Mazhab kritis—khususnya Horkheimer dan Adorno—terhadap Marx adalah keberatan mereka atas pembakuan ajaran ekonomisme, sehingga berpotensi melahirkan tiran-tiran baru yang lebih dominatif.

Oleh karena itu, sejak memulai analisisnya, kedua tokoh tersebut sangat konsisten dalam melakukan telaah terhadap aspek-aspek supra-struktur (ideology, kesadaran, pengetahuan) dalam struktur kekuasaan kapitalisme-modernisme. Sikap Horkheimer dan Adorno yang sangat keras terhadap positivisme juga lahir dari konsistensi analisis kritis yang mereka kembangkan.

Positivisme tidak hanya dianggap sebagai selubung pengetahuan yang menjadikan struktur kapitalisme lanjut berdiri secara kokoh, tetapi secara ideologis paradigma pengetahuan ini juga dianggap melakukan pembelaan-pembelaan terhadap struktur dominasi tersebut karena kepentingannya yang terlampaui besar dalam melindungi ketimpangan-ketimpangan dalam fakta sosial.<sup>56</sup>

### **Praxis Emansipasi sebagai Paradigma Ilmu Sosial**

Horkheimer dan Adorno bersepakat bahwa tugas pengetahuan harus dinaikkan tingkat dari taraf sekadar mengetahui (*to know*)—sebagaimana yang diajarkan oleh positivisme—menjadi praksis emansipatoris, yakni bertanggung

---

<sup>55</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 59-60

<sup>56</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 60

jawab dalam membebaskan manusia dari belenggu dominasi kebudayaan modern dan kapitalisme lanjut yang menyebabkan mayoritas orang mengalami dominasi, dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Bercermin dari kesalahan-kesalahan paradigma positivisme, Mazhab Kritis mendedahkan bahwa bagian terpenting tugas pengetahuan sosial justru terletak pada kemampuannya dalam menelanjangi fakta-fakta ketimpangan yang berhasil dibiarkan sedemikian rupa oleh kebudayaan modern. Hal inilah yang kemudian lazim disebut sebagai 'posisi subversi' ilmu pengetahuan.<sup>57</sup> Dalam pandangan Horkheimer dan Adorno, pengetahuan sosial memang harus terus menerus mengambil posisi yang berseberangan dengan pandangan-pandangan mainstream yang bersumber dari kebudayaan modern, positivisme, serta negara dan agama yang menjadi instrument kapitalisme lanjut.<sup>58</sup>

Dengan kata lain, tugas terpenting ilmu sosial di mata Horkheimer dan Adorno tidak lain adalah kemampuannya dalam menelanjangi fakta-fakta ketimpangan sosial yang sengaja dimapankan oleh berbagai saluran kekuasaan. Pandangan seperti erat kaitannya dengan kritik kedua tokoh tersebut terhadap paradigma positivisme.

Pertama, kritik atas pandangan positivisme dalam memandang fakta sosial. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas, dengan mengambil semangat ilmu-ilmu alam, Auguste Comte dan para pengikutnya sangat meyakini bahwa sifat dasar fakta sosial itu sama halnya dengan sifat fakta alam, yakni bersifat natural dan bersih dari semua jenis perekayasaan dan tarik ulur kekuasaan. Horkheimer dan Adorno menganggap pandangan ini hanya kedok bagi positivisme untuk melakukan pembelaan paradigmatik terhadap kelompok-kelompok dominant yang sangat berpretensi dalam mengendalikan fakta social. Berdasarkan telaah kedua tokoh Mazhab kritis tersebut, fakta social yang bersifat natural tersebut sama sekali tidak pernah ditemukan dalam rentang sejarah Barat. Sebaliknya, masyarakat Barat sejak awal justru terbentuk melalui relasi ideology dan dominasi sebagaimana relasi ideology dan dominasi dalam aforisme budak-majikan.

Melalui telaah seperti ini, Horkheimer dan Adorno memastikan bahwa sifat fakta social pada dasarnya dipenuhi dengan ketimpangan yang sengaja dikonstruksi dan dimapankan oleh pemilik-pemilik kekuasaan. Dan dengan demikian apabila ada paradigma pengetahuan yang sengaja tidak berkepentingan

<sup>57</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme Dan Modernitas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), 155

<sup>58</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, (Yogyakarta, Buku Baik, 2004), 90

dengan ketimpangan-ketimpangan yang terselubung dalam fakta sosial tersebut, maka dengan sendirinya pengetahuan itu secara ideologis sebenarnya sedang melakukan pemihakan terhadap kelompok-kelompok dominan.<sup>59</sup>

Kedua, setelah diketahui bahwa sifat dasar fakta sosial sebenarnya disesaki oleh ketimpangan yang dikonstruksi dan dimapankan oleh kelompok pemilik kekuasaan, maka tugas pengetahuan tidak dibenarkan hanya untuk memotret dan mengetahui fakta tersebut secara diametral. Horkheimer dan Adorno menganggap bahwa pandangan obyektivisme sebagaimana diyakini oleh positivisme mampu menjamin validitas pengetahuan dianggap tidak lebih dari sekadar alasan normatif pengetahuan tersebut dalam menyembunyikan fakta-fakta ketimpangan sosial kepada masyarakat.<sup>60</sup>

Dengan berpijak pada pandangan seperti ini, Horkheimer dan Adorno kemudian memastikan bahwa ilmu sosial tidak boleh terjebak pada klaim obyektivitas yang bisa menjadi alasan etis bagi para ilmuwan untuk tidak terlibat dalam tanggung jawab mendorong perubahan sosial. Bila ketimpangan-ketimpangan dalam fakta tidak dengan mudah dapat direfleksi oleh masyarakat karena kuatnya hegemoni modernisme dan kapitalisme, maka tugas terpenting pengetahuan adalah membongkar selubung-selubung ketimpangan tersebut, sehingga dapat membantu masyarakat dalam merefleksi kondisi ketertindasannya di bawah sistem kapitalisme lanjut. Inilah yang lazim disebut sebagai posisi subversif yang harus tetap dijaga oleh ilmu sosial.<sup>61</sup>

Dengan kata lain, ilmu sosial harus senantiasa mempersoalkan hal-hal yang sudah dianggap lazim dan wajar, karena pada dasarnya di balik hal-hal yang dianggap lazim dan wajar tersebut ada kekuatan hegemoni yang dimainkan oleh kekuasaan sehingga setimpang apapun fakta sosial tersebut bergulir, maka ia akan tetap gagal direfleksikan oleh masyarakat yang mengalami ketertindasan itu sendiri.

Ketiga, setelah berbagai ketimpangan sosial tersebut berhasil direfleksikan oleh kerja ilmu sosial, maka tugas lain yang masih harus dituntaskan oleh seorang ilmuan sosial adalah melakukan praksis kesadaran, pembebasan, dan mendorong masyarakat yang mengalami ketertindasan menuju taraf hidup yang lebih berkeadilan dan setara. Inilah yang lazim disebut sebagai praksis emansipatoris.

---

<sup>59</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 55-56

<sup>60</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 56

<sup>61</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), 177-178

Horkheimer dan Adorno bersikukuh menolak kerja ilmu sosial yang hanya bertanggung jawab untuk mengetahui (*to know*) hukum-hukum sosial sebagaimana diajarkan oleh positivisme. Lebih dari itu, tanggung jawab terbesar pengetahuan menurut kedua tokoh tersebut adalah membebaskan masyarakat dari belenggu belenggu hegemoni dan dominasi modernisme dan kapitalisme.<sup>62</sup> Secara faktual modernisme dan kapitalisme memang tidak pernah hadir dalam bentuk yang manifes, karena keduanya bisa menjadikan berbagai kekuatan negara, agama, pendidikan, dan pengetahuan sebagai instrumennya.

Dengan demikian melakukan praksis emansipatoris sebenarnya identik dengan kegiatan penyadaran masyarakat, karena diketahui bahwa ketertindasan masyarakat di bawah sistem modernisme dan kapitalisme lanjut sebenarnya berpangkal pada kesadaran, ideologi, dan pengetahuan masyarakat sendiri yang berhasil dihegemoni dan dianeksasi oleh kekuatan modernisme dan ideologi kapitalisme lanjut.<sup>63</sup>

Untuk memperjelas gambaran tentang posisi suversib dan praksis emansipasi sebagaimana ditawarkan oleh Horkheimer dan Adorno tersebut, dapat ditelaah dari tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Paradigma Positivisme dan Mazhab Kritis**

| <b>Aspek</b>           | <b>Positivisme</b>   | <b>Mazhab Kritis</b>  |
|------------------------|--|---|
| Fakta Sosial           | Bersifat natural   | Hasil konstruksi  |
| Metode                 | Prosedur Pengetahuan yang dibakukan dengan analisis statistik sebagai standar baku instrument analisisnya. | Berseberangan dengan kebenaran mainstream untuk membongkar ketimpangan-ketimpangan yang bersifat laten (Posisi Subversi)  |
| Tugas Ilmu Pengetahuan | Mengetahui ( <i>to know</i> ) Hukum Sosial   | 1. Membuka kedok dominasi modernisme dan kapitalisme lanjut<br>2. Bertanggung jawab membebaskan masyarakat dari dominasi modernisme-kapitalisme dan mendorong masyarakat ke taraf |

<sup>62</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 40-41

<sup>63</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi...*, 40

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | hidup berkeadilan dan setara<br>(Praksis Emansipasi) |
|--|--|--|

### **Praksis Emansipasi sebagai Perjuangan Kemanusiaan**

Term emansipasi yang digunakan oleh Horkheimer dan Adorno sebenarnya dikembangkan dari term yang sama yang pernah digunakan oleh Karl Marx. Marx menggunakan term emansipasi untuk menjelaskan kondisi kesetaraan dalam mengakses asset produksi setelah meledaknya revolusi kelas. Sementara itu, Horkheimer dan Adorno menggunakan term yang sama untuk menjelaskan upaya aktif yang harus terus menerus dilakukan oleh intelektual dalam mendorong masyarakat ke taraf hidup yang berkeadilan dan setara.

Meskipun Horkeimer dan Adorno sepekat dengan Marx dalam menggunakan term emansipasi sebagai maksud pembebasan manusia dari belenggu tirani dan dominasi, akan tetapi dengan basis epistemology yang berbeda makna emansipasi yang diperkenalkan oleh Horkheimer dan Adorno kemudian memiliki implikasi-implikasi yang melampaui pandangan-pandangan Marx dalam ajaran materialisme historis.

Emansipasi yang digunakan oleh Marx merujuk pada makna hasil atau kondisi yang sudah jadi. Ini berkaitan erat dengan pandangan Marx tentang revolusi kelas yang berlangsung determinis. Bila upaya mendorong kaum proletar pada keadaan bebas dan setara behubungan erat dengan alur revolusi sosial yang terjadi secara otomatis, maka dengan sendirinya emansipasi bermakna pasif.

Berbeda halnya dengan Horkheimer dan Adorno yang memahami akar ketertindasan manusia modern sebenarnya terletak pada kesadaran dan pengetahuannya sendiri, maka semua jenis usaha pembebasan dapat diartikan sebagai proses penyadaran, yang didalamnya pasti terjadi sosialisasi, negosiasi, bahkan resistensi dari subyek yang dibebaskan itu sendiri. Dengan demikian, emansipasi di tangan Horkheimer dan Adorno menjadi sebuah praksis pembebasan yang berlangsung secara pro-aktif.

Bila praksis emansipasi bermakna pasif (sebagaimana diajarkan oleh Marx), maka seorang intelektual atau pekerja sosial tidak memiliki tanggung jawab apapun dalam mendorong dan mengubah fakta ketimpangan sosial, karena kesetaraan dan keadilan komunal dibayangkan akan terjadi dengan sendirinya. Hal inilah yang sejak awal dipersoalkan sedemikian kritis oleh Horkheimer dan Adorno atas ajaran materialisme historis. Keadilan dan kesetaraan tidak pernah dapat dipahami sebagai hadiah yang tiba-tiba turun dari langit. Sebaliknya,

keadilan dan kesetaraan yang membebaskan manusia dari belenggu harus diupayakan secara gigih, terus menerus, sampai semua mata rantai dominasi dapat diputus satu persatu.

Untuk memperjelas perbedaan pandangan emansipasi antara Karl Marx dengan Horkheimer-Adorno, dapat diketahui dari tabel berikut.

**Tabel II**  
**Perbedaan Pandangan tentang Emansipasi**

| <b>Emansipasi</b> | <b>Karl Marx</b>   | <b>Horkheimer dan Adorno</b>  |
|-------------------|--|---|
| Basis             | Infra-struktur (pola produksi, modal)  | Supra-struktur (kesadaran, ideology, pengetahuan)   |
| Target            | Revolusi kelas, penguasaan aset produksi secara komunal                                  | Kemampuan merefleksi ketimpangan sosial dan melakukan resistensi terhadap struktur dominasi sehingga tercapai taraf hidup yang berkeadilan dan setara |
| Sifat             | Deterministik (terjadi secara otomatis) karena kekacauan inhern dalam sistem kapitalisme | Konstruksi, diupayakan sedemikian rupa melalui peran intelektual yang terus menerus merefleksi dan mendorong perubahan                                |

Di tangan Horkheimer dan Adorno, praksis emansipasi kemudian menjadi gerakan sosial yang menyejarah. Praksis pembebasan nilai-nilai kemanusiaan dari belenggu tiran dan kekuasaan, dipahami sebagai perjuangan kemanusiaan yang tidak akan ada habisnya, dan berlangsung terus selama kekuasaan tiran dan dominasi masih bercokol di muka bumi.

### **Simpulan**

Kerja-kerja intelektual pada akhirnya tidak sebatas hanya praksis mengikuti prosedur-prosedur semata. Fakta sosial-masyarakat tidak bersifat alami, hal ini dapat diketahui oleh rasio kritis. Jenis rasio kritis ini dapat mengetahui berbagai ketimpangan masyarakat, maka tanggung jawab ilmuwan sosial dituntut untuk menyuarakan rasio kritisnya terhadap ketidakadilan atau penindasan yang bercokol dalam kesadaran masyarakat modern.

Akhirnya, tugas atau kerja ilmuwan sosial tidak boleh berdistansi dengan (fakta) soisal masyarakat. Akan tetapi ilmuwan dituntut untuk melakukan praksis emansipatoris terhadap masyarakat melalui penyadaran, pembebasan yang didorong terus-menerus sehingga kondisi masyarakat berubah dari belenggu ketertindasan menuju ketaraf berkeadilan dan kesetaraan bersama. Praksis emansipasi adalah keterlibatan langsung ilmuwan sosial dengan menyadarkan langsung masyarakat akan adanya belenggu penindasan, terhadap kesadarannya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer : Inggris-Jerman*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. 1998. *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius.
- Echol, M. John, dan Shadily, Hassan. 1989. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiman, Fransisco Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta : Kanisius.
- Hardiman, Fransisco Budi. 2004. *Kritik Idiologi : Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta : Buku Baik.
- Hardiman, Fransisco Budi. 2004. *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Horkheimer, Max dan Adorno, Theodor W. *Dialectic of Enlightenment*. 1972  
Dialektika Pencerahan. ter. Ahmad Sihidah. 2002. Yogyakarta : Ircisod.
- Ritzer, George. and Goodman, J. Douglas. 2005. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- Riyadi, Hendar. 2005. *Tafsir Emansipatoris, Arah Baru Study Tafsir Al-Qur'an*, Bandung : Pustaka Setia.
- Santoso, Listiyono. Dkk. 2006. *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta : Ar-ruzz.
- Suseno, Franz Magniz. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta : Kanisius.
- Suseno, Franz Magniz. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.